



**LAPORAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2020**

2021

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak baik selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi. Capaian kinerja secara ringkas dapat diuraikan pada tabel berikut :

NO .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Yang Tertib, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Audit BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Dok	WTP	WTP Tercapai	100%
		Persentase Dokumen Penganggaran yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	80,00	80,00	100%
		Persentase realisasi pendapatan dan belanja	%	93,50	93,50	100%
		Persentase Laporan Keuangan yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	95,00	95,00	100%
		Prosentase Jumlah Aset Yang terinventarisasi, teridentifikasi dan terdokumentasi Dengan Total Seluruh Aset Yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten Lebak	%	43	43	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing indikator kinerja diatas, secara keseluruhan realisasi indikator kinerja tersebut dapat diwujudkan melebihi target yang telah ditetapkan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja disusun sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Negara Pendaayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta dengan berpedoman pada dan Peraturan Bupati Lebak Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak. Berdasarkan hal tersebut, maka setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak wajib menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dalam rangka upaya mewujudkan good goverment dan merupakan sebuah pendekatan management berbasis kinerja dalam rangka memberikan informasi kinerja untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Pemerintah yang baik untuk itu perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.

Laporan Kinerja (LKj) digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang selanjutnya untuk acuan dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun – tahun mendatang. Dengan pendekatan ini Laporan Kinerja (LKj) merupakan proses evaluasi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk perbaikan selanjutnya.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Lebak Nomor:

8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak.

Sebagaimana SKPD lainnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak merupakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lebak serta sebagai pelaksana dari sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Dalam Negeri, mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi dan melaksanakan fungsi penunjang keuangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
2. Penyusunan program, keuangan, pengolahan administrasi umum dan kepegawaian Badan;
3. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
4. Pengoordinasian penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
6. Pelaksanaan kesekretariatan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

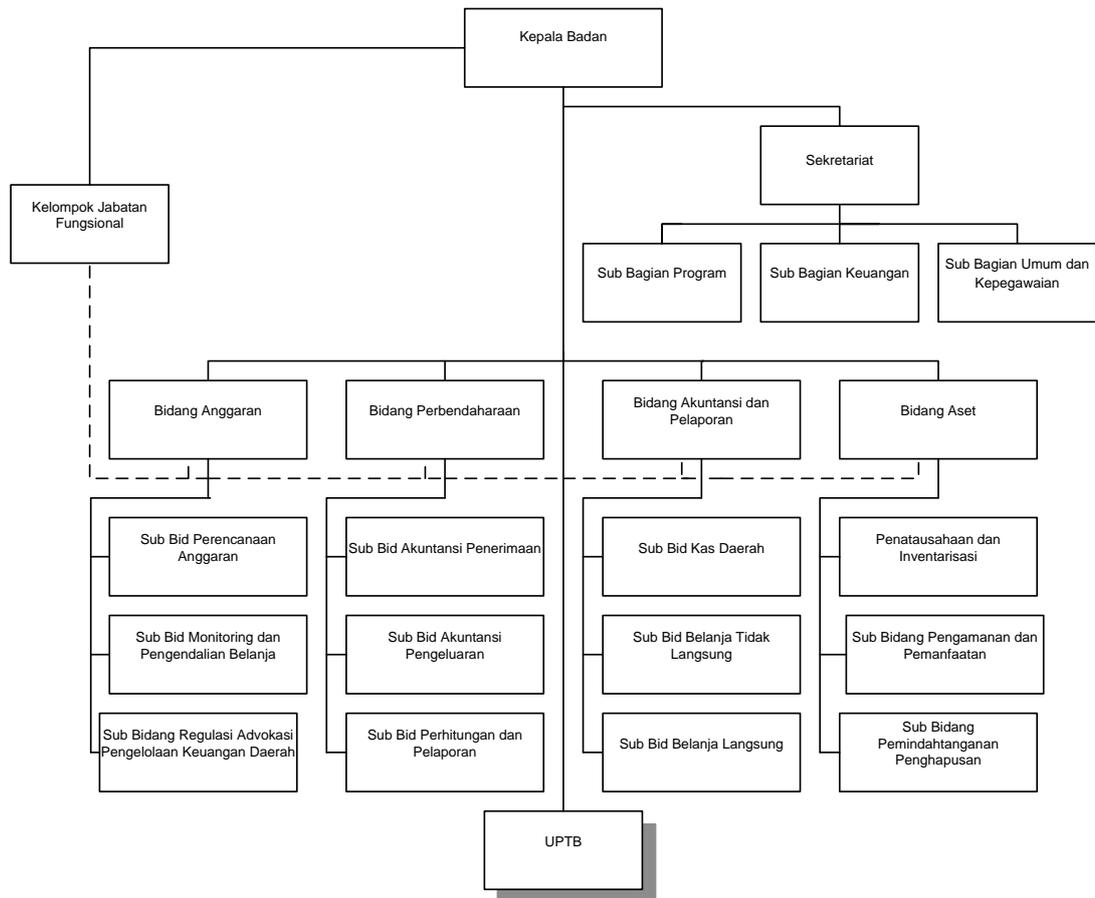
Sebagai alat manajemen, struktur organisasi ditetapkan untuk merencanakan sekaligus sebagai alat pengendalian atas tugas-tugas yang dilaksanakan. Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Lebak terdiri atas : Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Aset, Bidang Perbendaharaan, dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Susunan Organisasi BPKAD sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Program
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum
- c. Bidang Anggaran
 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran
 2. Sub Bidang Monitoring dan Pengendalian Belanja
 3. Sub Bidang Regulasi dan Advokasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- d. Bidang Perbendaharaan
 1. Sub Bidang Kas Daerah
 2. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung
 3. Sub Bidang Belanja Langsung
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
 1. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan
 2. Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran
 3. Sub Bidang Perhitungan dan Pelaporan
- f. Bidang Aset
 1. Sub Bidang Penatausahaan dan Inventarisasi
 2. Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan
 3. Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan
- g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
 1. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan
 2. Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran
 3. Sub Bidang Perhitungan dan Pelaporan
- h. UPTB
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Keterangan :

1. Garis Kedudukan —————
2. Garis Koordinasi - - - - -

1.4 ISU STRATEGIS

Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja Instansi pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah dan Tata Cara Pengendalian serta Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan.

Pelaksanaan kinerja Pemerintah selalu mengalami perubahan untuk mewujudkan tuntutan masyarakat yang selalu mencermati dan memperhatikan kinerja Pemerintah dalam pelayanan. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimulai dari strukturalisasi kelembagaan, reformasi birokrasi yang dibuat dalam tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada peningkatan kinerja instansi, sehingga terwujud tujuan Pemerintah daerah dalam mencapai Good dan Clean Governance.

Secara umum, kondisi 2020 digambarkan sebagai masa pengelolaan keuangan dan aset daerah yang penuh dinamika. Seiring dengan pandemic Covid 19 dan keharusan untuk melaksanakan refofusing anggaran, dan penyesuaian jadwal akibat banyaknya kegiatan yang ditunda dan tidak dilaksanakan, hingga berujung pada ketercapaian kinerja OPD. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan ketugasan adalah :

1. Recofusing dan penundaan beberapa kegiatan
2. Kepatuhan perencanaan anggaran
3. Kepatuhan dan ketepatan penatausahaan OPD.
4. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, distribusi, inventarisasi dan pengelolaan pemanfaatan serta inventarisasi barang milik daerah belum optimal.
5. Sistem pengendalian internal masih perlu ditingkatkan.
6. Perlu adanya peningkatan kompetensi bagi pengelola keuangan dan barang milik daerah di masing-masing OPD.
7. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) perlu ditingkatkan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah :

1. Melakukan pendampingan kepada OPD terkait pendanaan kegiatan yang bisa dilaksanakan dan yang bisa direfocusing selama masa pandemi;

2. Melakukan pendampingan kepada OPD dalam penyusunan anggaran sesuai perencanaan, tepat waktu, efisien dan efektif.
3. Melakukan sosialisasi, konsolidasi, rekonsiliasi, sinkronisasi dan bimbingan teknis penatausahaan keuangan agar sesuai standar akuntansi Pemerintah dan tepat waktu;
4. Melaksanakan pendampingan terhadap perencanaan barang daerah dalam bentuk RKBMD, dan distribusi serta pembinaan terhadap pengelolaan barang milik daerah.
5. Meningkatkan dan mengevaluasi SPIP.

Dengan adanya permasalahan tersebut diatas maka BPKAD Kabupaten Lebak akan lebih berperan sebagai mitra kerja OPD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, pelaksana koordinasi dalam penyusunan anggaran dan penyusunan laporan keuangan daerah.

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKj ini secara umum memuat target dan capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020. Sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja, LKj ini menginformasikan perbandingan antara target dan capaian kinerja (performance results) Tahun 2020 dengan target dan kinerja pada tahun sebelumnya. Dari analisa tersebut akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (Performance gap) sehingga dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai berikut :

1. Ikhtisar Eksekutif,
2. Bab I Pendahuluan
3. Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja,
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
5. Bab IV Penutup

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Langkah awal yang harus dilakukan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun adalah mulai dari pencermatan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak yang merupakan dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari Tahun 2019 – 2024 dengan berorientasi terhadap hasil yang akan dicapai selaras dengan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Visi kepala daerah terpilih yang akan difokuskan pada upaya mewujudkan **“Kabupaten Lebak sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal”** merupakan langkah terobosan yang dipilih bagi percepatan pembangunan ekonomi daerah yang sekaligus merupakan kontekstualisasi dari visi RPJPD yang bertujuan memajukan wilayah perdesaan, yang secara faktual memiliki potensi besar di sektor kepariwisataan. Dan dengan pilihan pada sektor kepariwisataan ini diyakini akan mampu menumbuhkan dan mengintegrasikan beragam sektor secara optimal, termasuk didalamnya adalah sektor pertanian yang saat ini menjadi sumber penghidupan utama masyarakat perdesaan.

Upaya mewujudkan visi di atas diterjemahkan dalam 5 (lima) misi operasional sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
2. Meningkatkan produktifitas perekonomian daerah melalui pengembangan pariwisata;
3. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah;
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam melaksanakan tugasnya dan untuk mendukung pencapaian visi Kepala Daerah, BPKAD turut berperan melalui pelaksanaan misi

kelima RPJMD yang kemudian diuraikan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	: Lebak Sebagai Destinasi Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal		
MISI 5	: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Layanan Publik Yang Berkualitas	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah	1 Penerapan Pedoman pelaksanaan APBD dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak
			2 Penerapan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai jadwal dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
			3 Melakukan review dan pemutakhiran seluruh produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah beserta pedoman teknis pelaksanaannya

Program/kegiatan BPKAD yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari program pembangunan Kabupaten Lebak yang berisi program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Untuk tahun 2020, program-program dan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Ikhtisar program-program dan untuk periode 2019-2024 yang menjadi domain pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja 2020, dikelompokkan ke dalam 5 Program sebagai berikut:

- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja Keuangan

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak dengan Bupati Lebak merupakan suatu lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati kepada Kepala Badan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.

Adapun isi dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2020 adalah sebagai berikut ini :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2020
	2	3	4
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Yang Tertib, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Audit BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP
		Persentase Dokumen Penganggaran yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80,00%
		Persentase realisasi pendapatan dan belanja	93,50%
		Persentase Laporan Keuangan yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	95,00%
		Prosentase Jumlah Aset Yang terinventarisasi, teridentifikasi dan terdokumentasi Dengan Total Seluruh Aset Yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten Lebak	43,00%

Anggaran belanja langsung setelah perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.650.158.125
2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	33.424.000
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.426.043.850
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	150.000.000
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja Keuangan	751.407.400
	Jumlah	7.011.033.375

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA BPKAD TAHUN 2020

Pengukuran kinerja dilakukan untuk membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Pengukuran Kinerja tersebut digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, pengukuran capaian kinerja ini dikategorikan ke dalam 4 kategori, yaitu:

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 85%	Sangat baik
II	70% sampai 85%	Baik
III	55% sampai 69%	Cukup
IV	Kurang dari 55%	Kurang

Pada tahun 2020, capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak mencakup capaian 1 sasaran strategis yang didukung dengan pelaksanaan 5 program dan 20 kegiatan, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak 2020.

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang taat azas adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Yang Tertib, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel dengan 5 indikator yaitu:

1. Audit BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
2. Persentase Dokumen Penganggaran yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Persentase realisasi pendapatan dan belanja;
4. Persentase Laporan Keuangan yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5. Persentase Jumlah Aset Yang terinventarisasi, teridentifikasi dan terdokumentasi Dengan Total Seluruh Aset Yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten Lebak.

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 3.1

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Yang Tertib, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Audit BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP Tercapai	100,00
		Persentase Dokumen Penganggaran yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80,00	80,00	100,00
		Persentase realisasi pendapatan dan belanja	93,50	93,50	100,00
		Persentase Laporan Keuangan yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	95,00	95,00	100,00
		Prosentase Jumlah Aset Yang terinventarisasi, teridentifikasi dan terdokumentasi Dengan Total Seluruh Aset Yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten Lebak	43,00	43,00	100,00

Pada tahun 2020, Audit BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah memiliki target WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), dan berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019 Nomor :

27a/LHP/XVIII.SRG/05/2020, tanggal 18 Mei 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten, Opini BPK untuk laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak sudah memperoleh Opini WTP.

Target Persentase Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terealisasi sebesar 100% dari target sebanyak 80% perangkat daerah yang menyerahkan dokumen penganggaran tepat waktu dan sesuai selama tahun 2020. Dokumen penganggaran dimaksud termasuk RKA, DPA dan DPPA. Persentase realisasi pendapatan dan belanja diperoleh dari rata-rata realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2020 dan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2020. Pada tahun 2020, pendapatan daerah terealisasi sebesar 97,89% dan belanja daerah terealisasi sebesar 89,13%, dengan demikian realisasi pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2020 tercapai sebesar 93,5%.

Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ditargetkan sebesar 95% dan terealisasi sebesar 95%. Capaian ini dihitung berdasarkan jumlah Perangkat Daerah yang menyerahkan dokumen Laporan Keuangan sebelum 31 Januari dan sesuai dengan aturan. Sedangkan untuk Persentase Jumlah Aset Yang terinventarisasi, teridentifikasi dan terdokumentasi Dengan Total Seluruh Aset Yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten Lebak untuk semua jenis barang milik daerah ditargetkan sebesar 43% dan tercapai sebesar 43% atau 100%. Meskipun demikian, keakuratan data aset yang dimiliki dapat lebih ditingkatkan melalui sensus.

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Capaian Tahun 2019

Pengukuran kinerja juga dilakukan untuk membandingkan realisasi kinerja tahun 2020 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi kinerja tersebut tersaji pada tabel 3.3.

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target Capaian Kinerja dan Realisasi
Tahun 2019-2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI	
			2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Yang Tertib, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Audit BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP
		Persentase Dokumen Penganggaran yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
		Persentase realisasi pendapatan dan belanja	93,00%	93,50%	93,00%	93,50%
		Persentase Laporan Keuangan yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	94,00%	95,00%	94,00%	95,00%
		Prosentase Jumlah Aset Yang terinventarisasi, teridentifikasi dan terdokumentasi Dengan Total Seluruh Aset Yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten Lebak	40,00%	43,00%	40,00%	43,00%

Indikator kinerja Audit BPK pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun 2019 sudah mencapai target WTP dan tercapai kembali opini WTP ini pada tahun 2020. Sebagai catatan,

capaian target indikator kinerja ini sudah tercapai sejak audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2015. Dengan demikian tahun 2020 adalah tahun kelima Pemerintah Kabupaten Lebak memperoleh predikat WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disajikan.

Secara umum, untuk target lainnya bila dibandingkan dengan tahun 2019, maka pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Persentase Dokumen Penganggaran yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan menunjukkan capaian 80% sebagaimana ditargetkan. Capaian ini merupakan akumulasi dari seluruh tahapan penganggaran yang disampaikan oleh perangkat daerah dan selanjutnya dikumpulkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Masih adanya pergeseran atau perubahan sebelum perubahan APBD menunjukkan masih perlunya peningkatan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

Persentase realisasi pendapatan dan belanja daerah mengalami peningkatan 0,5% dibandingkan dengan tahun 2019. Realisasi tersebut dihitung dari rerata realisasi pendapatan dan realisasi belanja. Secara umum meski ditengah pandemi Covid 19, pendapatan daerah mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, terutama di kelompok Dana Perimbangan yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Meskipun demikian, pandemi berpengaruh banyak terhadap realisasi belanja daerah.

Persentase Laporan Keuangan yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, sebagian besar perangkat daerah mampu menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu, meskipun demikian kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan tetap harus ditingkatkan. Peningkatan juga terjadi pada indikator Prosentase Jumlah Aset Yang terinventarisasi, teridentifikasi dan terdokumentasi Dengan Total Seluruh Aset Yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten Lebak sebesar 3% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan

ini salah satunya didukung atas pemanfaatan ATISISBADA pada pengelolaan barang milik daerah dan peningkatan kemampuan pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah.

3.1.3. Perbandingan Realisasi hingga tahun 2020 dengan target Jangka Menengah (Renstra 2019-2024)

Pada Rencana Strategis BPKAD tahun 2019-2024, target kinerja BPKAD ditetapkan dalam mencapai visi kepala daerah hingga RPJMD 2019-2024 berakhir. Untuk mengukur sejauh mana kontribusi capaian kinerja tahun 2020 terhadap pencapaian target kinerja BPKAD tahun 2024, maka perlu dilakukan perbandingan realisasi hingga tahun 2020 dengan target Renstra 2019-2024 sebagai berikut:

Tabel 3.3

Perbandingan Antara Target Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Target Renstra 2019-2024

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2020	2024	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Yang Tertib, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Audit BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	100
		Persentase Dokumen Penganggaran yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80,00	86,00	25,00
		Persentase realisasi pendapatan dan belanja	93,50	94,50	40,00
		Persentase Laporan Keuangan yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	95,00	95,00	100,00
		Prosentase Jumlah Aset Yang terinventarisasi, teridentifikasi dan terdokumentasi Dengan Total Seluruh Aset Yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten Lebak	43,00	48,00	25,00

3.1.4 Perbandingan Realisasi hingga tahun 2020 dengan Standar Nasional

Capaian opini WTP ini telah melampaui target kinerja keuangan daerah dibidang penguatan tata kelola pemda yang ditetapkan dalam RPJMN 2019-2023, yakni masing-masing sebesar 85% Pemerintah Provinsi, 60% Pemerintah Kabupaten, dan 65% Pemerintah Kota pada 2020. Pemerintah Kabupaten Lebak sudah turut berkontribusi sebagai pemerintah kabupaten yang memiliki opini audit WTP.

Sementara untuk target lainnya merupakan target perangkat daerah yang ditetapkan sebagai capaian kinerja BPKAD dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel. Standar Nasional disebutkan dalam target waktu yang harus dipenuhi dalam penyusunan dokumen penganggaran dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah.

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Pada tahun 2020, pandemi Covid 19 menyebabkan Pemerintah Pusat memerintahkan Seluruh Pemerintah Daerah untuk melakukan refocusing anggaran untuk mendukung penanganan Covid 19 dan penundaan beberapa kegiatan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah terutama realisasi belanja daerah. Meskipun demikian, upaya bersama untuk terus melaksanakan program pembangunan daerah ditengah pandemi menjadi penunjang keberhasilan pencapaian target sasaran pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel. Beberapa upaya yang menunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah tahun 2020 dimaksud adalah:

1. Optimalisasi pemanfaatan media sosial dan aplikasi pertemuan dalam jaringan. Hal ini agar komunikasi dan koordinasi oleh seluruh perangkat daerah;

2. Optimalisasi pengawasan internal oleh Perangkat daerah, serta pengawasan dan pembinaan oleh APIP. Hal ini dengan dilakukan dengan terus mengingatkan peran *maker-checker-approver* pada perangkat daerah.
3. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIMRAL yang mendukung integrasi pengelolaan keuangan daerah serta aplikasi ATISISBADA yang membantu pengelolaan barang milik daerah;
4. Terus melaksanakan pendampingan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
5. Koordinasi intensif dengan pemangku kepentingan lainnya seperti BPN, KPP Pratama, dan KPPN;

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Target Opini Audit BPK atas Laporan keuangan pemerintah Daerah merupakan target bersama yang didukung oleh seluruh bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan anggaran sebesar Rp. 7.011.033.375,- dan telah dilaksanakan dengan penyerapan anggaran sebesar 93,93%.

5. Analisis Program/Kegiatan Menunjang

Upaya merealisasikan capaian kelima indikator kinerja ditunjang dengan pelaksanaan 2 program yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja Keuangan. Meskipun demikian dukungan program kegiatan rutin seperti Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tetap memberikan kontribusi. Adapun rincian analisa program/kegiatan penunjang pencapaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian indikator kinerja Sasaran I

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Yang Tertib, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Audit BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah b. Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Persentase Dokumen Penganggaran yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80,00		a. Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah b. Penyusunan Rancangan Perda APBD, Perbup Penjabaran APBD dan Perubahannya
		Persentase realisasi pendapatan dan belanja	93,50		c. Penunjang Pelaksanaan APBD
		Persentase Laporan Keuangan yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	95,00		d. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
		Prosentase Jumlah Aset Yang terinventarisasi, teridentifikasi dan terdokumentasi Dengan Total Seluruh Aset Yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten Lebak	43,00		e. Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah

Dari penilaian sendiri (self assessment) berdasarkan metode/cara/langkah kerja tersebut di atas, secara keseluruhan, capaian rata-rata Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran tersebut adalah sebesar 100,00% terhadap target Perjanjian Kinerja atau 100,00% terhadap target Renstra, sehingga dapat dikatakan kinerja yang dihasilkan sudah sangat baik. Rincian capaian kinerja masing-masing sasaran untuk tahun 2020 diikhtisarkan sebagai berikut:

20	kegiatan dicapai dengan nilai kinerja > 85%
-	kegiatan dicapai dengan nilai kinerja antara 70% - 85%
-	kegiatan dicapai dengan nilai kinerja antara 55% - 69%
-	kegiatan dicapai dengan nilai kinerja kurang dari 55%

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan untuk mencapai target kinerja yang diinginkan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah disepakati bersama.

Sesuai dengan Perda No. 7 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dan Perda No. 3 Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Perubahan APBD, pada tahun 2020, total anggaran belanja langsung BPKAD Kabupaten Lebak sebesar Rp. 7.011.033.375,- dengan realisasi sebesar Rp.6.585.754.893,- atau 93,93% dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan alokasi anggaran Rp. 1.426.043.850.000,- telah dilaksanakan dengan penyerapan anggaran 90,67% dan fisik telah tercapai 100,00%, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran Rp. 250.150.000,- telah dilaksanakan dengan penyerapan anggaran 69,49% dan fisik telah tercapai 100,00%.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan alokasi anggaran Rp. 44.000.000,- telah dilaksanakan dengan penyerapan anggaran 99,97% dan fisik telah tercapai 100,00%.

- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan alokasi anggaran Rp. 130.187.600,- telah dilaksanakan dengan penyerapan anggaran 91,40% dan fisik telah tercapai 100,00%.
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dengan alokasi anggaran Rp. 142.940.000,- telah dilaksanakan dengan penyerapan anggaran 94,59% dan fisik telah tercapai 100,00%.
- 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan alokasi anggaran Rp. 318.111.000,- telah dilaksanakan dengan penyerapan anggaran 92,05% dan fisik telah tercapai 100,00%.
- 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran Rp. 100.942.250,- telah dilaksanakan dengan penyerapan anggaran 99,00% dan fisik telah tercapai 100,00%.
- 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran Rp. 9.235.000,- telah dilaksanakan dengan penyerapan anggaran 99,81% dan fisik telah tercapai 100,00%.
- 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran Rp. 198.615.000,- telah dilaksanakan dengan penyerapan anggaran 96,44% dan fisik telah tercapai 100,00%.
- 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan alokasi anggaran Rp. 8.688.000,- telah dilaksanakan dengan penyerapan anggaran 99,19% dan fisik telah tercapai 100,00%.
- 10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan alokasi anggaran Rp. 79.900.000,- telah dilaksanakan dengan penyerapan anggaran 91,63% dan fisik telah tercapai 100,00%.
- 11) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 143.071.000,- telah dilaksanakan dengan penyerapan anggaran 99,02% dan fisik telah tercapai 100,00%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan alokasi anggaran Rp. 150.000.000,- telah dilaksanakan dengan penyerapan anggaran 99,99% dan fisik telah tercapai 100,00%, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor dengan alokasi anggaran Rp. 150.000.000,- telah dilaksanakan dengan penyerapan anggaran 99,99% dan fisik telah tercapai 100,00%.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan alokasi anggaran Rp. 751.407.400,- telah dilaksanakan dengan penyerapan anggaran 97,54% dan fisik telah tercapai 100,00%, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 611.837.400,- telah dilaksanakan dengan penyerapan anggaran 97,04% dan fisik telah tercapai 100,00%.
 - 2) Kegiatan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 139.570.000,- telah dilaksanakan dengan penyerapan anggaran 99,73% dan fisik telah tercapai 100,00%.
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 33.424.000,- telah dilaksanakan dengan penyerapan anggaran 74,10% dan fisik telah tercapai 100,00%, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 33.424.000,- telah dilaksanakan dengan penyerapan anggaran 74,10% dan fisik telah tercapai 66,66%.
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 4.650.158.125,- telah dilaksanakan dengan penyerapan anggaran 94,30% dan fisik telah tercapai 100,00%, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 1.149.379.000,- telah dilaksanakan dengan penyerapan anggaran 99,08% dan fisik telah tercapai 100,00%.
- b. Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda APBD, Perbup Penjabaran APBD dan Perubahannya dengan alokasi anggaran Rp. 805.736.000,- telah dilaksanakan dengan penyerapan anggaran 94,22% dan fisik telah tercapai 100,00%.
- c. Kegiatan Penunjang Pelaksanaan APBD dengan alokasi anggaran Rp. 326.905.000,- telah dilaksanakan dengan penyerapan anggaran 96,58% dan fisik telah tercapai 100,00%.
- d. Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 1.022.270.000,- telah dilaksanakan dengan penyerapan anggaran 82,54% dan fisik telah tercapai 100,00%.
- e. Kegiatan Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 1.345.868.125,- telah dilaksanakan dengan penyerapan anggaran 98,64% dan fisik telah tercapai 100,00%.

Secara lebih terinci, realisasi kegiatan BPKAD pada tahun 2020 tersaji pada tabel berikut ini:

KODE REKENING	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
3.00.02	URUSAN KEUANGAN			
3.00.02.01	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
3.00.3.00.02.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	49,957,284,064.00	43,761,203,084.00	87.60
3.00.3.00.02.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	49,957,284,064.00	43,761,203,084.00	87.60
3.00.3.00.02.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	49,831,884,064.00	43,644,539,771.00	87.58
3.00.3.00.02.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan	125,400,000.00	116,663,313.00	93.03
3.00.3.00.02.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	7,011,033,375.00	6,585,754,893.00	93.93
3.00.3.00.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,426,043,850.00	1,292,972,577.00	90.67
3.0.02.3.0.02.01.00.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	250,150,000.00	173,831,402.00	69.49
3.0.02.3.0.02.01.00.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	130,187,600.00	118,996,208.00	91.40
3.0.02.3.0.02.01.00.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	142,940,000.00	135,213,640.00	94.59
3.0.02.3.0.02.01.00.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	44,000,000.00	43,986,151.00	99.97

KODE REKENING	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
3.0.02.3.0.02.01.00.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	318,111,000.00	292,831,440.00	92.05
3.0.02.3.0.02.01.00.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,942,250.00	99,933,235.00	99.00
3.0.02.3.0.02.01.00.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9,235,000.00	9,217,000.00	99.81
3.0.02.3.0.02.01.00.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198,615,000.00	197,014,000.00	99.19
3.0.02.3.0.02.01.00.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	8,892,000.00	7,065,000.00	79.45
3.0.02.3.0.02.01.00.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	79,900,000.00	73,209,000.00	91.63
3.0.02.3.0.02.01.00.01.020	Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Luar Daerah	143,071,000.00	141,675,501.00	99.02
3.00.3.00.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	150,000,000.00	149,980,000.00	99.99
3.0.02.3.0.02.01.00.02.022	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	150,000,000.00	149,980,000.00	99.99
3.00.3.00.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	751,407,400.00	732,950,780.00	97.54
3.0.02.3.0.02.01.00.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	139,570,000.00	139,195,690.00	99.73
3.0.02.3.0.02.01.00.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah	611,837,400.00	593,755,090.00	97.04
3.00.3.00.02.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4,650,158,125.00	4,385,083,536.00	94.30
3.0.02.3.0.02.01.00.15.016	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	1,022,270,000.00	843,739,303.00	82.54
3.0.02.3.0.02.01.00.15.018	Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah	1,345,868,125.00	1,327,609,553.00	98.64
3.0.02.3.0.02.01.00.15.021	Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah	1,149,379,000.00	1,138,818,460.00	99.08
3.0.02.3.0.02.01.00.15.022	Penyusunan Rancangan Perda APBD, Perbup Penjabaran APBD dan Perubahannya	805,736,000.00	759,198,250.00	94.22
3.0.02.3.0.02.01.00.15.023	Penunjang Pelaksanaan APBD	326,905,000.00	315,717,970.00	96.58
3.00.01	URUSAN PERENCANAAN	33,424,000.00	24,768,000.00	74.10
3.0.01.3.0.02.01.00.21.015	Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	33,424,000.00	24,768,000.00	74.10
	JUMLAH	56,968,317,442.00	50,346,957,981.00	88.38

IV. PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa secara umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya yaitu sebanyak 5 indikator kinerja dari 1 sasaran. Adapun tingkat capaian untuk masing-masing indikator tersebut adalah 100,00% atau 5 indikator dengan kategori **baik sekali**.

Meskipun demikian, untuk terus meningkatkan kinerja BPKAD Kabupaten Lebak, maka beberapa upaya pada tahun 2021 harus dilaksanakan yaitu:

1. Pendampingan perangkat daerah berkenaan dengan penerapan SIPD yang digunakan Pemerintah Kabupaten Lebak mulai tahun 2021;
2. Masa pandemi belum usai, optimalisasi komunikasi dan koordinasi dalam jaringan (*online*) dengan para pihak harus terus ditingkatkan;
3. Peraturan perundangan pengelolaan keuangan dan aset daerah akan segera diterbitkan, oleh karenanya diseminasi ke perangkat daerah akan gencar dilaksanakan

Demikian Laporan ini kami sajikan dengan harapan dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi yang konstruktif sekaligus memberi manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Lebak bagi peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Rangkasbitung, Januari 2021
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN LEBAK,

BUDI SANTOSO, AP, M.Si
NIP. 19750720199412100



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BUDI SANTOSO, AP., M.Si**

Jabatan : **KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LEBAK**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE., MM**

Jabatan : **BUPATI LEBAK**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE., MM

RANGKASBITUNG, 10 Januari 2020

Pihak Pertama,



BUDI SANTOSO, AP., M.Si

NIP: 197507201994121002

SATUAN KERJA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Predikat	3.0

Kode	Urusan / Program	Anggaran
0000	NON URUSAN	2.797.708.700,00
0000.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.558.782.000,00
0000.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.000.000,00
0000.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000,00
0000.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.108.926.700,00
3001	PERENCANAAN	33.424.000,00
3001.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	33.424.000,00
3002	KEUANGAN	4.321.493.000,00
3002.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.321.493.000,00

Total Jumlah Anggaran : Rp. 7.152.625.700,00

BUPATI

Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE., MM





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NURUL HAKIM, S.Hut.,M.Sc**

Jabatan : **SEKRETARIS**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BUDI SANTOSO, AP., M.Si**

Jabatan : **KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LEBAK**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

BUDI SANTOSO, AP., M.Si

NIP: 197507201994121002

RANGKASBITUNG, 10 Januari 2020

Pihak Pertama,

NURUL HAKIM, S.Hut.,M.Sc

NIP: 197702252000031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan penyelenggaraan administrasi perkantoran	%	100.0
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	%	100.0
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis	%	100.0

Kode	Urusan / Program	Anggaran
3002	KEUANGAN	1.688.782.000,00
3002.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.558.782.000,00
3002.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.000.000,00
3002.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000,00

TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp.

1.688.782.000,00



Sekretaris

NURUL HAKIM, S.Hut., M.Sc
NIP: 197702252000031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. RENI RIDHAWAHYUNI, S.Si, MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BUDI SANTOSO, AP., M.Si**

Jabatan : **KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LEBAK**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

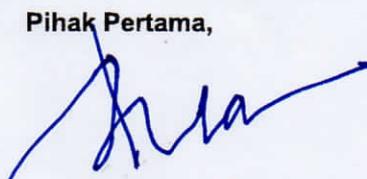
Pihak Kedua,



BUDI SANTOSO, AP., M.Si
NIP: 197507201994121002

RANGKASBITUNG, 10 Januari 2020

Pihak Pertama,



Hj. RENI RIDHAWAHYUNI, S.Si, MM

NIP: 197806212005022002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

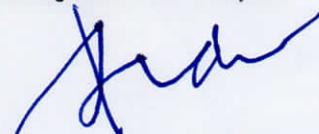
NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase capaian kinerja dan Keuangan Daerah	%	100.0
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	95.0

Kode	Urusan / Program	Anggaran
3002	KEUANGAN	5.430.419.700,00
3002.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.108.926.700,00
3002.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.321.493.000,00
TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp.		5.430.419.700,00

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN LEBAK


BUDI SANTOSO, AP., M.SI
NIP: 197507201994121002

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan


Hj. RENI RIDHAWAHYUNI, S.Si, MM
NIP: 197806212005022002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUNG BUDI SANTOSO, MT**

Jabatan : **KEPALA BIDANG ANGGARAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BUDI SANTOSO, AP., M.Si**

Jabatan : **KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LEBAK**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

RANGKASBITUNG, 10 Januari 2020

Pihak Kedua,



BUDI SANTOSO, AP., M.Si
NIP: 197507201994121002

Pihak Pertama,



AGUNG BUDI SANTOSO, MT
NIP: 197903012005021002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	80,0

Kode	Urusan / Program	Anggaran
3002	KEUANGAN	4.321.493.000,00
3002.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.321.493.000,00
TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp.		4.321.493.000,00

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO, AP., M.Si
NIP: 197507201994121002

Kepala Bidang Anggaran



AGUNG BUDI SANTOSO, MT
NIP: 197903012005021002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DINI ANGGRAENI, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG ASET**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BUDI SANTOSO, AP., M.Si**

Jabatan : **KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LEBAK**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

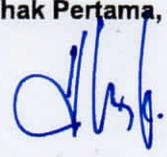
RANGKASBITUNG, 10 Januari 2020

Pihak Kedua,



BUDI SANTOSO, AP., M.Si
NIP: 197507201994121002

Pihak Pertama,



DINI ANGGRAENI, S.Sos, M.Si
NIP: 197605042006042020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Jumlah Aset Yang terinventarisasi, teridentifikasi dan terdokumentasi Dengan Total Seluruh Aset Yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten Lebak	%	43.0

Kode	Urusan / Program	Anggaran
3002	KEUANGAN	4.321.493.000,00
3002.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.321.493.000,00
TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp.		4.321.493.000,00



Kepala Bidang Aset



DINI ANGGRAENI, S.Sos, M.Si
NIP: 197605042006042020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SOBARI, S.IP, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BUDI SANTOSO, AP., M.Si**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LEBAK**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

RANGKASBITUNG, 10 Januari 2020

Pihak Kedua,

BUDI SANTOSO, AP., M.Si
NIP: 197507201994121002

Pihak Pertama,

SOBARI, S.IP, M.Si
NIP: 197404131998031005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase realisasi pendapatan dan belanja daerah	%	93,0

Kode	Urusan / Program	Anggaran
3002	KEUANGAN	4.321.493.000,00
3002.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.321.493.000,00
TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp.		4.321.493.000,00

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO, AP., M.Si
NIP: 197507201994121002

Kepala Bidang Perbendaharaan

SOBARI, S.IP, M.Si
NIP: 197404131998031005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUPRIYADI, SE**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NURUL HAKIM, S.Hut.,M.Sc**

Jabatan : **SEKRETARIS**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

RANGKASBITUNG, 10 Januari 2020

Pihak Kedua,



NURUL HAKIM, S.Hut.,M.Sc

NIP: 197702252000031002

Pihak Pertama,

SUPRIYADI, SE

NIP: 196502061994031005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa layanan telekomunikasi/internet	Bulan	12.0
2		Jumlah penyediaan jasa layanan air bersih	Bulan	12.0
3		Jumlah penyediaan jasa layanan listrik	Bulan	12.0
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional roda 4	Unit	6.0
5		Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional roda 4	Unit	15.0
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan jasa layanan kebersihan kantor	Bulan	12.0
7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah penyediaan jasa layanan perbaikan peralatan kerja	Bulan	12.0
8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	Jenis	68.0
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang digandakan	Jenis	516290.0
10		Jumlah barang yang dicetak	Jenis	9.0
11	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	Jenis	9.0
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Eksemplar	2074.0
13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Porsi	1720.0
14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Bulan	12.0
15		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Bulan	12.0
16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	Unit	1.0
17	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat singkat	Orang	6.0



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Anggaran
0000	NON URUSAN	1.688.782.000,00
0000.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.558.782.000,00
0000.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	218.960.000,00
0000.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	102.371.500,00
0000.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	142.940.000,00
0000.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	44.000.000,00
0000.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	376.211.000,00
0000.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	197.384.500,00
0000.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.235.000,00
0000.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	8.892.000,00
0000.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	79.900.000,00
0000.01.020	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Luar Daerah	378.888.000,00
0000.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.000.000,00
0000.02.022	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	100.000.000,00
0000.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber-Data Aparatur	30.000.000,00
0000.05.006	Peningkatan Kapasitas ASN	30.000.000,00

TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp.

1.688.782.000,00



Sekretaris

NURUL HAKIM, S.Hut., M.Sc
NIP: 197702252000031002

Kepala Sub Bagian Umum

SUPRIYADI, SE
NIP: 196502061994031005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RENI SETIYOWATI, A.Md**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NURUL HAKIM, S.Hut.,M.Sc**

Jabatan : **SEKRETARIS**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

RANGKASBITUNG, 10 Januari 2020

Pihak Kedua,



NURUL HAKIM, S.Hut.,M.Sc

NIP: 197702252000031002

Pihak Pertama,

RENI SETIYOWATI, A.Md

NIP: 198204052005022002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	Dokumen	5.0

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Anggaran
0000	NON URUSAN	146.920.000,00
0000.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	146.920.000,00
0000.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	146.920.000,00
TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp.		146.920.000,00



NURUL HAKIM, S.Hut., M.Sc
NIP: 197702252000031002

Kepala Sub Bagian Keuangan

RENI SETIYOWATI, A.Md
NIP: 198204052005022002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADE SETIAWAN, SE

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NURUL HAKIM, S.Hut.,M.Sc

Jabatan : SEKRETARIS

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

*NURUL HAKIM, S.Hut.,M.Sc

NIP: 197702252000031002

RANGKASBITUNG, 10 Januari 2020

Pihak Pertama,

ADE SETIAWAN, SE

NIP: 197502212014121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tesusun	Dokumen	3.0

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Anggaran
3001	PERENCANAAN	33.424.000,00
3001.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	33.424.000,00
3001.21.015	Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	33.424.000,00
TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp.		33.424.000,00



Sekretaris

NURUL HAKIM, S.Hut., M.Sc
NIP: 197702252000031002

Kepala Sub Bagian Program

ADE SETIAWAN, SE
NIP: 197502212014121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAHRUL FIRMANSYAH, SE

Jabatan : KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI PENGELUARAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. RENI RIDHAWAHYUNI, S.Si, MM

Jabatan : KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

Hj. RENI RIDHAWAHYUNI, S.Si, MM
NIP: 197806212005022002

RANGKASBITUNG, 10 Januari 2020

Pihak Pertama,

FAHRUL FIRMANSYAH, SE
NIP: 197910262010011009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun: LKPD, Perda LPPA, Perbup LPPA dan Laporan Semester I, pendampingan SIMRAL BPPT	Dokumen	4.0

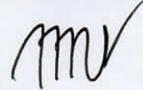
Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Anggaran
0000	NON URUSAN	962.006.700,00
0000.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	962.006.700,00
0000.06.008	Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	962.006.700,00
TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp.		962.006.700,00

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan



HJ. RENI RIDHAWAHYUNI, S.Si, MM
NIP: 197806212005022002

Kepala Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran



FAHRUL FIRMANSYAH, SE
NIP: 197910262010011009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BAI TURJUNI**

Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI PENERIMAAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Hj. RENI RIDHAWAHYUNI, S.Si, MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN**

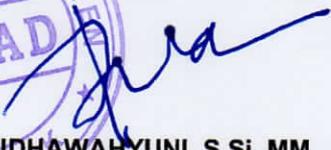
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,


Hj. RENI RIDHAWAHYUNI, S.Si, MM
NIP: 197806212005022002

RANGKASBITUNG, 10 Januari 2020

Pihak Pertama,



BAI TURJUNI
NIP: 196202241984082001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun: LKPD, Perda LPPA, Perbup LPPA dan Laporan Semester I, pendampingan SIMRAL BPPT	Dokumen	4.0

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Anggaran
0000	NON URUSAN	962.006.700,00
0000.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	962.006.700,00
0000.06.008	Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	962.006.700,00
TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp.		962.006.700,00

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan



HJ. RENI RIDHAWAHYUNI, S.Si, MM
NIP: 197806212005022002



Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan



BAI TURJUNI
NIP: 197407272005022002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERA YULIAWATI, SE

Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PERHITUNGAN DAN PELAPORAN

selanjutnya disebut pihak pertama

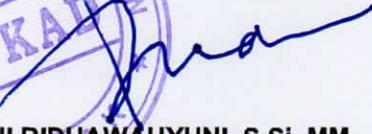
Nama : HJ. RENI RIDHAWAHYUNI, S.Si, MM

Jabatan : KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

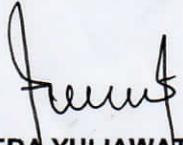
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,

HJ. RENI RIDHAWAHYUNI, S.Si, MM
NIP: 197806212005022002

RANGKASBITUNG, 10 Januari 2020

Pihak Pertama,

HERA YULIAWATI, SE
NIP: 197407272005022002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun: LKPD, Perda LPPA, Perbup LPPA dan Laporan Semester I, pendampingan SIMRAL BPPT	Dokumen	4.0

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Anggaran
0000	NON URUSAN	962.006.700,00
0000.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	962.006.700,00
0000.06.008	Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	962.006.700,00
TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp.		962.006.700,00

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan



Hj. RANI RIDHAWATYUNI, S.Si, MM
NIP: 197806212005022002

Kepala Sub Bidang Perhitungan dan Pelaporan

HERA YULIAWATI, SE
NIP: 197407272005022002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NOVI RAHMAYATI, M.Si**

Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG REGULASI DAN ADVOKASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AGUNG BUDI SANTOSO, MT**

Jabatan : **KEPALA BIDANG ANGGARAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

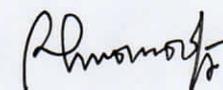
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
AGUNG BUDI SANTOSO, MT
NIP: 197903012005021002

RANGKASBITUNG, 10 Januari 2020

Pihak Pertama,


NOVI RAHMAYATI, M.Si
NIP: 197511102005022001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan Tugas TAPD	Laporan	12.0
2		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS 2021 serta KUPA dan PPAS Perubahan 2020	Dokumen	4.0
3		Jumlah laporan keuangan berdasarkan sumber-sumber pendanaan beserta realisasinya	Buku	20.0
4		Jumlah Buku Pajak Rokok	Buku	5.0
5		Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen	4.0

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Anggaran
3002	KEUANGAN	987.953.000,00
3002.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	987.953.000,00
3002.15.021	Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah	987.953.000,00

TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp.

987.953.000,00



Kepala Sub Bidang Regulasi dan Advokasi
Pengelolaan Keuangan Daerah

NOVI RAHMAYATI, M.Si
NIP: 197511102005022001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IVAN KARYADI, S.IP, M.Si**

Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AGUNG BUDI SANTOSO, MT**

Jabatan : **KEPALA BIDANG ANGGARAN**

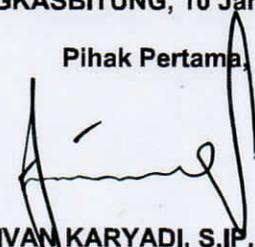
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
AGUNG BUDI SANTOSO, MT
NIP: 197903012005021002

RANGKASBITUNG, 10 Januari 2020

Pihak Pertama,

IVAN KARYADI, S.IP, M.Si
NIP: 197704242005021002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Rancangan Perda APBD, Perbup Penjabaran APBD dan Perubahannya	Jumlah dokumen-dokumen sebagai berikut : (1) Surat edaran penyusunan Pedoman RKA-SKPD, DPA-SKPD dan DPPA-SKPD ; (2) Rancangan Perubahan APBD 2020 dan Rancangan APBD 2021; (3) Nota Keuangan, Nota Pengantar, dan Jawaban Bupati atas Raperda P-APBD 2020 dan Ra	Dokumen	12,0

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Anggaran
3002	KEUANGAN	999.413.000,00
3002.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	999.413.000,00
3002.15.022	Penyusunan Rancangan Perda APBD, Perbup Penjabaran APBD dan Perubahannya	999.413.000,00
TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp.		999.413.000,00



Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran

IVAN KARYADI, S.IP, M.Si
NIP: 197704242005021002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AAN SUHENDAR**

Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG MONITORING DAN PENGENDALIAN BELANJA**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AGUNG BUDI SANTOSO, MT**

Jabatan : **KEPALA BIDANG ANGGARAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

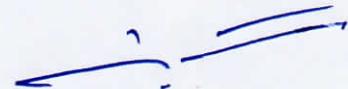
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,

AGUNG BUDI SANTOSO, MT
NIP: 197903012005021002

RANGKASBITUNG, 10 Januari 2020

Pihak Pertama,



AAN SUHENDAR

NIP: 196407191990121001



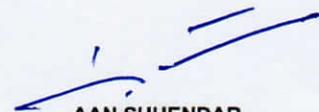
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan berdasarkan sumber-sumber pendanaan beserta realisasinya	Buku	20.0
2		Jumlah Buku Pajak Rokok	Buku	5.0

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Anggaran
3002	KEUANGAN	987.953.000,00
3002.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	987.953.000,00
3002.15.021	Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah	987.953.000,00
TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp.		987.953.000,00


Kepala Bidang Anggaran
AGUNG BUDI SANTOSO, MT
NIP: 197903012005021002

Kepala Sub Bidang Monitoring dan Pengendalian Belanja


AAN SUHENDAR
NIP: 196407191990121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADE FATHUROHMAN, S.AP, M.Si

Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN ASET DAN INVENTARISASI

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DINI ANGGRAENI, S.Sos, M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG ASET

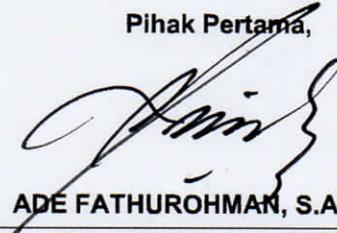
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

RANGKASBITUNG, 10 Januari 2020

Pihak Pertama,


ADE FATHUROHMAN, S.AP, M.Si

NIP: 198403302005021002

Pihak Kedua,


DINI ANGGRAENI, S.Sos, M.Si

NIP: 197605042006042020

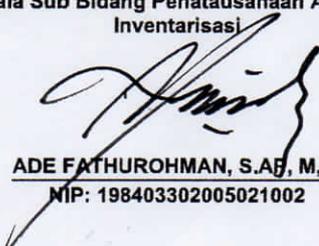


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah	Jumlah Penilaian BMD	Kegiatan	2.0
2		Jumlah Penjualan BMD	Kegiatan	2.0
3		Jumlah Penaksir BMD	Kegiatan	2.0
4		Jumlah Dokumen SKTJM	Dokumen	1.0
5		Jumlah Rapat pembahasan kasus TP TGR	Kali	4.0
6		Jumlah Sidang kasus TP TGR	Kali	2.0
7		Jumlah Laporan Neraca Aset Tetap Daerah	Dokumen	1.0
8		Jumlah Laporan Nilai Aset sebagai bahan Laporan Keuangan Daerah	Dokumen	1.0
9		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang dilakukan inventarisasi/sensus	Dokumen	1.0

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Anggaran
3002	KEUANGAN	890.408.000,00
3002.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	890.408.000,00
3002.15.018	Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah	890.408.000,00
TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp.		890.408.000,00


Kepala Bidang Aset
DINI ANGGRAENI, S.Sos, M.Si
NIP: 197605042006042020

Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset dan Inventarisasi

ADE FATHUROHMAN, S.Af, M.Si
NIP: 198403302005021002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LIESNA HALIMUTUSA, SE, MM**

Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PENGAMANAN DAN PEMANFAATAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DINI ANGGRAENI, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG ASET**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

RANGKASBITUNG, 10 Januari 2020

Pihak Kedua,



DINI ANGGRAENI, S.Sos, M.Si

NIP: 197605042006042020

Pihak Pertama,

LIESNA HALIMUTUSA, SE, MM

NIP: 198605282010012003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Jumlah pendaftaran pensertifikatan tanah pemda	Bidang	15.0
2		Jumlah penelusuran dokumen sumber kepemilikan tanah	Dokumen	15.0
3		Jumlah penjaminan asuransi barang milik daerah kendaraan roda 4	Unit	176.0
4		Jumlah penjaminan asuransi barang milik daerah gedung pemerintah	Unit	6.0

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Anggaran
3002	KEUANGAN	979.422.000,00
3002.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	979.422.000,00
3002.15.016	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	979.422.000,00

TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp.

979.422.000,00


Kepala Bidang Aset

DINI ANGGRAENI, S.Sos, M.Si
NIP: 197605042006042020

Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan


LIESNA HALIMUTUSA, SE, MM
NIP: 198605282010012003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUPRI ADNANI, SE**

Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DINI ANGGRAENI, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG ASET**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

DINI ANGGRAENI, S.Sos, M.Si

NIP: 197605042006042020

RANGKASBITUNG, 10 Januari 2020

Pihak Pertama,

SUPRI ADNANI, SE

NIP: 196508161997031004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	
1	Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah	Jumlah Penilaian BMD	Kegiatan	2.0	
2		Jumlah Penjualan BMD	Kegiatan	2.0	
3		Jumlah Penaksir BMD	Kegiatan	2.0	
4		Jumlah Dokumen SKTJM	Dokumen	1.0	
5		Jumlah Rapat pembahasan kasus TP TGR	Kali	4.0	
6		Jumlah Sidang kasus TP TGR	Kali	2.0	
7					
8					
9					

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Anggaran
3002	KEUANGAN	890.408.000,00
3002.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	890.408.000,00
3002.15.018	Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah	890.408.000,00
TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp.		890.408.000,00


Kepala Bidang Aset
DIN LANGGRAENI, S.Sos, M.Si
NIP: 197605042006042020

Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan

SUPRI ADNANI, SE
NIP: 196508161997031004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ADE SUMIATI**

Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG BELANJA LANGSUNG**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SOBARI, S.IP, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

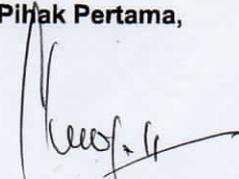
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

RANGKASBITUNG, 10 Januari 2020

Pihak Kedua,

SOBARI, S.IP, M.Si
NIP: 197404131998031005

Pihak Pertama,


ADE SUMIATI
NIP: 196212031991032002



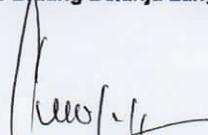
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Penunjang Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Penyerapan Dana Transfer (DAU, DAK FISIK, dan DAK NON FISIK)	Laporan	12.0
2		Jumlah Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah	Kali	4.0

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Anggaran
3002	KEUANGAN	464.297.000,00
3002.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	464.297.000,00
3002.15.023	Penunjang Pelaksanaan APBD	464.297.000,00
TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp.		464.297.000,00


Kepala Bidang Perbendaharaan

SOBARI, S.IP, M.Si
NIP: 197404131998031005

Kepala Sub Bidang Belanja Langsung

ADE SUMIATI
NIP: 196212031991032002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIAN ANDRIYANI, SE

Jabatan : KEPALA SUB BIDANG KAS DAERAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SOBARI, S.IP, M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

RANGKASBITUNG, 10 Januari 2020

Pihak Kedua,



SOBARI, S.IP, M.Si

NIP: 197404131998031005

Pihak Pertama,

RIAN ANDRIYANI, SE

NIP: 197802052009012001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Penunjang Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Penyerapan Dana Transfer (DAU, DAK FISIK, dan DAK NON FISIK)	Laporan	12.0
2		Jumlah Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah	Kali	4.0

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Anggaran
3002	KEUANGAN	464.297.000,00
3002.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	464.297.000,00
3002.15.023	Penunjang Pelaksanaan APBD	464.297.000,00
TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp.		464.297.000,00



Kepala Sub Bidang Kas Daerah

RIAN ANDRIYANI, SE
NIP: 197802052009012001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUNAJAT, SE**

Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG BELANJA TIDAK LANGSUNG**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SOBARI, S.IP, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

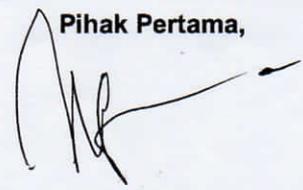
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

RANGKASBITUNG, 10 Januari 2020

Pihak Kedua,

SOBARI, S.IP, M.Si
NIP: 197404131998031005

Pihak Pertama,

MUNAJAT, SE
NIP: 197403142008011008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Penunjang Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Penyerapan Dana Transfer (DAU, DAK FISIK, dan DAK NON FISIK)	Laporan	12.0
2		Jumlah Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah	Kali	4.0

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Anggaran
3002	KEUANGAN	464.297.000,00
3002.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	464.297.000,00
3002.15.023	Penunjang Pelaksanaan APBD	464.297.000,00
TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp.		464.297.000,00



Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung



MUNAJAT, SE
NIP: 197403142008011008